

## KEKUASAAN SIMBOLIK DALAM WACANA POLITIK DI MEDIA CETAK

*Lilik Wahyuni*

PBSI- IKIP Budi Utomo Malang

Email: lilik.wahyuni@ymail.com.

### ABSTRACT

*As a social practice, language is used to persuade, influence, argue, refuse, maintain, and to response one's reaction. Using language, one may practically produce and reproduce authority. This article deals with the symbolic fight and the mechanism of symbolic force within politics discourse in written media. The analysis technique used is critical discourse analysis, especially in the interaction between language and social structure. The result shows that the symbolic fight in the written media represents the practice of continuing the doxa by the orthodoxa group and of attacking it by the heterodoxa group. The strategies of fighting the doxa are by showing the orthodoxa group's weaknesses, arousing the enmity within the group, comparing the orthodoxa group to others, and by using SARA and community issues. The mechanism of the symbolic force used by the ortodoxa is the use of euphemism and censor.*

**Key words:** *kekuasaan simbolik, doxa, orthodoxa, SARA, dan wacana politik.*

### 1. Pendahuluan

Bahasa merupakan praktik sosial. Melalui bahasa, suatu kelompok sosial saling berinteraksi. Konsekuensi dari pengertian tersebut adalah bahasa dipahami sebagai suatu tindak yang bertujuan. Dengan menggunakan bahasa seseorang melakukan kegiatan membujuk, mempengaruhi, mendebat, menyanggah, mempertahankan, dan mereaksi orang lain. Selain itu, bahasa juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Sebagai suatu bentuk praktik sosial, dalam bahasa terkandung pertarungan kepentingan atau pertandingan ideologis. Dengan begitu, fakta sosial yang disampaikan dengan

bahasa merupakan hasil dari proses pertarungan antara kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial yang ada di masyarakat. Caranya yaitu dengan menggunakan pilihan kata dan tata bahasa tertentu sehingga mengimplikasikan ideologi tertentu. Dari paparan tersebut dapat diperoleh konsekuensi pemahaman bahwa wacana tidak sekedar dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks tetapi sebagai sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Dalam proses memproduksi gagasan tersebut, penutur dipengaruhi oleh konteks sosial budaya tertentu yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak.

Karena adanya perbedaan cara berpikir dan bertindak, dalam proses interaksi selalu

ada pihak yang dikuasai dan ada yang menguasai. Kekuasaan berlangsung di mana-mana. Sebagaimana dikatakan Foucault (Eriyanto, 2001:65—66) bahwa strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu dari dalam. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penguasa dan dikuasai. Di antaranya yaitu pengetahuan, ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu bentuk pertarungan kekuasaan dapat dilihat dalam wacana politik yang disampaikan di media cetak berikut.

“Kami sampai harus rapat berkali-kali untuk menentukan apakah nama yang dicantumkan itu, harus nama presiden atau cukup dengan pemerintah. Akhirnya saya putuskan nama presiden saja. Saya tidak bermaksud memfitnah. Tetapi coba pahami pergolakan batin saya bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia,” kata Wiranto kepada sejumlah media, mengenai iklan dirinya yang pekan lalu menuding SBY ingkar janji.

Dari tuturan di atas dapat dilihat serangan Wiranto terhadap penguasa negara, yakni SBY. Dengan pernyataan “*Tetapi coba pahami pergolakan batin saya bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia*” Wiranto merespon kebijakan pemerintah untuk mengkonstruksi citra dirinya yang perhatian kepada rakyat dan citra SBY yang tidak perhatian pada rakyat. Untuk lebih meningkatkan citranya, Wiranto menggunakan pernyataan “*Saya tidak bermaksud memfitnah*”. Melalui respon tersebut Wiranto melakukan tindak merebut simpati publik untuk

mendelegitimasi kekuasaan SBY sehingga terjadi penurunan otoritas SBY. Melalui pernyataannya, Wiranto melakukan tindak membuka perlawanan terhadap SBY. Strategi tersebut bisa diterima karena SBY merupakan kelompok *orthodoxa* yang berusaha untuk dikalahkan Wiranto dalam perebutan Presiden mendatang.

Praktik perebutan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis. Hal itu sejalan dengan ciri analisis wacana kritis sebagai pendekatan yang meneliti interaksi antara bahasa dan struktur sosial dalam rangka untuk menjelaskan cara struktur sosial dibentuk dengan interaksi linguistik kelompok elit. Termasuk dalam bahasa di sini adalah penggunaan foto dan gambar. Van Dijk (1988) mengatakan bahwa untuk menghindari deskripsi dan eksplanasi belaka, analisis wacana kritis bisa dikaji dengan pendekatan pragmatik, semiotik, dan analisis wacana dan memberi perhatian secara eksplisit pada sosiopolitik dan presupposisi kultural dan implikasi wacana. Analisis wacana kritis secara khusus meneliti gabungan ciri bahasa untuk melihat cara bahasa digunakan untuk mereproduksi struktur sosial. Fokus analisis wacana kritis adalah pada pola bahasa level makro dan mikro yang menggambarkan kekuasaan dan legitimasi ide. Yang termasuk dalam analisis wacana kritis ini adalah analisis jenre, gaya retorik, dan alasan memproduksi dan mereproduksi kekuasaan dan dominasi. Selanjutnya Remlinger ([http://www.linguistik-online.de/heft1\\_99/remlinger.htm](http://www.linguistik-online.de/heft1_99/remlinger.htm)) menggunakan pandangan Hodge & Kress (1993) dan van Dijk (1988) mengatakan bahwa analisis wacana kritis cenderung menggunakan data teks tulis dan catatan tuturan kelompok elit.

Pengertian di atas berdampak pada langkah kerja analisisnya. Bourdieu dalam teori praktiknya mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari cara hidup individu dan kelompok sosial. Karena itu, bahasa harus dipahami sebagai instrumen tindakan. Sebagai

instrumen tindakan, bahasa harus dianalisis dari struktur-struktur objektif yang tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur mental dalam individu yang merupakan hasil penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis asal-usul struktur-struktur sosial itu sendiri. Dalam analisis struktur objektif, bahasa ditempatkan dalam situasi komunikasi yang homogen dan menggambarkan penggunaan bahasa secara efektif yang diterapkan di dalam situasi konkret. Pada bagian ini, bahasa dipahami sejalan dengan *parolenya* Saussure (1988). Adapun dalam analisis struktur sosial dan asal usul struktur sosial itu sendiri, bahasa dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosio-historis yang melatarbelakangi terjadinya praktik bahasa. Dalam hal ini, bahasa dikatakan sebagai manifestasi dari otoritas institusi. Pengertian institusi oleh Bourdieu (Bourdieu, 1994 dan Kaelan, 2004) dipahami sebagai keseluruhan relasi sosial yang relatif terus bertahan, yang memberikan berbagai bentuk kekuasaan, status, dan sumber daya hidup kepada individu-individu. Dari dua sudut pandang tersebut, bahasa selanjutnya ditempatkan sebagai sebuah permainan yang di dalamnya mempunyai aturan-aturan permainan sendiri. Aturan dari permainan satu tidak ada yang universal. Karena itu, setiap bahasa harus dipahami dengan gramatiknya masing-masing

Berdasarkan alasan di atas maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada (1) pertarungan simbolik dalam wacana politik di media cetak dan (2) mekanisme kekerasan simbolik dalam wacana politik di media cetak.

Analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang memandang wacana sebagai praktik sosial. Wacana dikaji dalam dialektika antara bahasa dan struktur sosial. Analisis wacana kritis digunakan untuk menjelaskan tentang cara struktur sosial dibentuk dalam interaksi linguistik kelompok elit. Dalam hal ini, wacana harus disikapi sebagai peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya (Bourdieu,

1994; Fairclough, 1989, 1995; dan van Dijk, 1998). Bourdieu dalam Rusdiarti (2003:33), menyatakan praktik sosial tersebut disikapi sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior adalah internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar diri pelaku sosial sedangkan eksternalisasi interior adalah pengungkapan segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial.

Dari pengertian tersebut, bahasa tidak bisa dipahami sebagai mekanisme internal linguistik semata dan bukan suatu objek yang terisolasi dalam ruang yang tertutup. Bahasa hendaknya tidak sekadar ditempatkan dalam hubungan komunikasi murni. Bahasa harus dipahami sebagai teks dan konteks secara keseluruhan. Teks tidak hanya dimaknai sebagai kata-kata yang tercetak di lembar kertas tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks dimaknai sebagai semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan, situasi, tindak, dan sebagainya.

Interaksi antarpelaku sosial terjadi dalam medan yang mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial yang memandang realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang). Dunia sosial tersebut terdiri atas banyak arena yang memiliki keterkaitan penting satu sama lain. Siapa saja yang masuk dalam suatu arena harus memahami “aturan main” yang berlaku di arena tersebut karena arena merupakan tempat terjadinya pertarungan, adu kekuatan, tempat dominasi dan konflik antarindividu, antarkelompok demi mendapatkan posisinya (Witgenstein dalam Kaelan, 2004, Bourdieu, 1994, Austin, 1962). Gejala ini dapat terjadi dalam berbagai peristiwa tutur, baik dalam situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan.

Menurut Bourdieu (1994), arena sosial merupakan arena pertarungan antara wacana dominan atau *doxa* dengan wacana-wacana

lain yang ingin menggugatinya. Di setiap arena ada wacana dominan dan wacana marginal. Wacana dominan akan terus berusaha mempertahankan keberadaannya, sedangkan wacana marginal akan berusaha untuk menjatuhkannya. Gejala tersebut sangat tampak jika diamati dalam wacana politik yang berisi perebutan kekuasaan. Kelompok dominan berusaha untuk mempertahankan diri sedangkan kelompok marginal berusaha untuk menjatuhkan kelompok dominan.

Dalam kajian analisis wacana kritis, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Pemakaian bahasa bukan hanya berkaitan dengan pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca melainkan ia juga sebagai bagian dari anggota kategori sosial tertentu dan bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas, dan masyarakat tertentu. Hal ini mengimplikasikan bahwa analisis wacana kritis tidak membatasi kajiannya pada detail teks atau struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Tuturan antara pemimpin partai politik dengan anggotanya dan antara politikus dari partai yang satu terhadap partai yang lain bukanlah tuturan yang alamiah, karena di sana terdapat dominasi kekuasaan melalui *doxa*, yaitu wacana yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dan tidak pernah lagi dipertanyakan sebab-sebabnya, apalagi kebenarannya terhadap pihak yang dikuasai dan terdapat pertarungan antara *heterodoxa*, wacana yang bertentangan dengan *doxa* dengan *orthodoxa*, wacana yang terus berusaha mempertahankan *doxa*.

Dalam komunikasi politik yang didominasi oleh kekuasaan tersebut terjadi proses kontrol. Pada saat satu bahasa menjadi wacana yang mendominasi pasar, ia menjadi norma yang diterima kebenarannya. Harga,

nilai, bahkan makna wacana-wacana lain ditentukan oleh *doxa*. Dunia sosial penuh dengan *doxa*. Bentuk *doxa* bisa berupa kebiasaan-kebiasaan sederhana, seperti penggunaan bentuk *-ken* dalam *manfaatken, lakukan;* bentuk *daripada* dalam “*manfaat daripada pertemuan ini adalah.....*”, sampai wacana lain yang lebih luas, yaitu kepercayaan atau ideologi.

Dalam arena pertentangan wacana, satu kelompok mengontrol kelompok lain lewat wacana. Kontrol tidak selalu dilakukan secara fisik akan tetapi bisa juga secara mental atau psikis. Kelompok dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkan olehnya, berbicara dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut van Dijk (1998) kelompok dominan lebih bisa melakukan kontrol karena mereka lebih mempunyai akses dibandingkan dengan kelompok subordinat. Kelompok dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, pendidikan dibandingkan dengan kelompok subordinat.

Wacana politik sebagai suatu dunia sosial menjadi arena pertarungan yang terus bergerak dinamis. Wacana-wacana yang terpinggirkan akan terus berusaha untuk menghancurkan tatanan *doxa* dan siap-siap mengambil posisinya. Pertarungan antara *heterodoxa*, dan *orthodoxa* akan terus berlangsung. *Doxa* biasanya didukung oleh kelompok sosial yang dominan dan berkuasa yang menikmati *status quo*. Oleh karena itu, biasanya mereka akan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan segala cara karena mereka diuntungkan oleh *doxa* tersebut.

Semua bentuk dominasi harus mendapatkan pengakuan atau diterima sebagai sebuah legitimasi. Untuk itulah diperlukan kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang dapat mendesak kelompok yang dikuasai agar menerima ideologi yang ditanamkannya dan “memaksakannya” agar menjadi legitim dengan menyembunyikan hubungan kekuasaan yang

mendasari kekuasaannya. Di medan simbolik inilah pertarungan kelas terjadi. Gejala ini dapat diamati pada wacana politik yang berisi pertarungan dengan menggunakan simbol-simbol bahasa untuk “memaksakan” ideologinya.

Dalam kekuasaan simbolik, sebuah kekuasaan politik memiliki kemampuan untuk tidak dapat dikenali bentuk aslinya, kekerasannya, atau kesewenang-wenangannya. Untuk menyembunyikan motivasi yang sebenarnya (yaitu dominasi), kekuasaan simbolik sering memakai bentuk-bentuk lain yang lebih halus agar tidak mudah dikenali. Dengan cara tersebut, kelompok yang terdominasi sering tidak merasa keberatan untuk masuk ke dalam sebuah lingkaran dominasi. Cara tersebut oleh Bourdieu (1994) disebut sebagai kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian atau *doxa*”. *Doxa* dapat diperoleh melalui proses inkalkulasi atau proses penamaan yang berlangsung terus-menerus. Proses inkalkulasi berlangsung secara efektif dalam dunia politik. Di sinilah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, bahasa tubuh, bahkan nilai-nilai dan ideologi diajarkan melalui bahasa.

Pelaku dalam wacana politik menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang wajar karena dalam diri mereka telah ditanamkan suatu bentuk kekerasan simbolik secara terus menerus. Menurut Bourdieu dalam Rusdiati (2003:38—39) mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara yaitu eufimisasi dan sensorisasi. Eufimisasi biasanya membuat kekerasan simbolik tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali, dan dipilih secara “tak sadar”. Bentuknya dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, hutang, pahala, atau belas kasihan. Adapun mekanisme sensorisasi menjadikan kekerasan simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai “moral kehormatan”

seperti kesantunan, kesucian, kedermawanan, dan sebagainya yang biasanya dipertentangkan dengan “moral rendah” seperti kekerasan, kriminal, ketidakpantasan, asusila, kerakusan, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk tersebut ditemui dalam wacana politik. Eufimisasi dan sensorisasi dilakukan oleh politikus dalam melakukan kekerasan simbolis. Bahasa secara efektif dipraktikkan oleh politikus untuk saling mengontrol dengan pelaku sosial yang lain. Tujuan utama adalah menciptakan dunia yang diinginkan. Dengan cara tersebut, masyarakat diharapkan dapat mendukung mereka untuk mempertahankan *status quo*.

Sejalan dengan pemahaman analisis wacana kritis, semua bentuk praktik sosial yang ada dalam masyarakat patut dipertanyakan. Di balik kondisi masyarakat yang terlihat produktif sebenarnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak. Salah satunya dapat dilihat pada berita di media massa. Objektivitas isi wacana di media massa perlu dipertanyakan karena bisa menjadi alat kelompok dominan yang ada dalam masyarakat. Pada wacana di media massa, bisa jadi dominasi kekuasaan sedang dimapankan sehingga jika masyarakat mempercayai media bisa jadi pada saat itu masyarakat sedang memperkuat dan mempercayai struktur sosial yang pada dasarnya tidak seimbang dan palsu.

Dalam pemikiran Frankfurt, media hanya dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan sekaligus memarginalkan dan meminggirkan kelompok minoritas. Oleh karena itu, kajian terhadap media dalam perspektif ini terutama diarahkan untuk membongkar kenyataan yang telah diselewengkan dan dipalsukan oleh kelompok dominan untuk kepentingannya (Eriyanto, 2001:26).

Dalam fungsinya sebagai media kekuasaan simbolik kelompok dominan untuk menguasai kelompok subordinat, media massa melakukan

proses representasi kelompok lain melalui proses yang kompleks. Media melakukan proses pen-  
definisan dan penandaan sehingga motivasi  
sebenarnya dari kelompok dominan bisa  
direpresentasikan sebagai sesuatu yang wajar  
dan terlihat alamiah. Dengan cara tersebut, ma-  
syarakat bisa mempercayai isi berita dan  
menganggapnya sebagai suatu realitas.

Proses pembentukan realitas dilakukan  
media massa dengan menggunakan bahasa dan  
politik penandaan (Hall dalam Eriyanto, 2001).  
Bahasa oleh Saussure (1988) direduksi menjadi  
sekadar hubungan komunikasi murni. Informasi  
di dalam pesan lebih penting daripada peristiwa  
komunikasi itu sendiri. Dalam pandangan ini,  
yang menjadi objek kajian bahasa adalah eksis-  
tensi bahasa yang tidak memiliki hubungan  
kausalitas dengan hakikat manusia dan kehi-  
dupannya. Akan tetapi, menurut Bourdieu  
(1994) hubungan komunikasi tidak hanya  
sampai pada proses pertukaran bahasa. Impli-  
kasi dari pandangan ini, wacana harus dipan-  
dang sebagai arena pertarungan sosial dan  
semuanya diartikulasikan lewat bahasa. Karena  
itu, melalui bahasa dalam media massa dapat  
dilihat motivasi penutur untuk membentuk *doxa*.

Politik penandaan berkaitan dengan cara  
media massa membentuk makna, mengontrol,  
dan menentukan makna. Media massa ber-  
peran dalam menyampaikan peristiwa atau  
realitas dalam pandangan tertentu dan menun-  
jukkan peran ideologi dalam pertarungan  
kelompok yang ada di masyarakat. Dengan  
begitu, bentuk pemikiran dan persepsi masya-  
rakat terhadap ideologi *doxa* tergantung pada  
proses penandaan itu sendiri. Implikasinya ada-  
lah penampilan pesan dan realitas yang mendu-  
kung ideologi *doxa* tersebut tampak seperti  
nyata, alami, dan benar. Masyarakat tidak  
menyadari bahwa mereka dibentuk, dikontrol,  
dan ditentukan dengan melalui media massa.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pene-  
litian ini adalah pendekatan kualitatif. Pola-pola

ujaran penutur di media cetak disajikan dalam  
bentuk verbal bukan angka-angka. Dalam  
melakukan kajian ini, peneliti berperan sebagai  
instrumen kunci, baik dalam pengumpulan data  
maupun dalam menafsirkan data.

Metode yang digunakan dalam penelitian  
ini adalah metode analisis wacana kritis dengan  
rancangan hermeneutika Gadamer karena  
dalam penelitian ini tuturan di media ceta  
dipandang sebagai piranti praktik pertarungan  
politik. Tuturan yang disampaikan penulis  
bukan hanya berisi pesan dari penciptanya saja  
tetapi berasal dari ruang multidimensi yang  
tersebar dalam tulisan.

Data penelitian ini berupa ujaran yang  
disikapi sebagai simbol-simbol dalam perta-  
rungan simbolik di media cetak. Sumber data  
penelitian ini berupa media cetak yang bersifat  
nasional. Ujaran di media cetak, di satu sisi  
disikapi sebagai tindak yang dilakukan pe-  
ngusaha untuk menyebar ideologi, alat legitimasi,  
dan kontrol atas wacana publik, di sisi lain juga  
disikapi sebagai tindak yang dilakukan oleh  
kelompok marjinal untuk melakukan perla-  
wanan terhadap penguasa.

Pengumpulan data penelitian mengguna-  
kan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul  
selanjutnya dianalisis metode interpretatif.  
Analisis data dilakukan melalui kegiatan  
pemilahan data, pemilihan data, dan penafsiran  
data. Pemilahan data digunakan untuk melihat  
kekuatan data yang merujuk pada bagaimana  
data itu harus dipahami atau fokus apa se-  
benarnya yang ditampilkan. Hasil dari pemi-  
lahan data adalah data yang sudah terkategori.  
Penafsiran data merupakan kegiatan mema-  
hami dan mendialogkan dengan wawasan teori  
yang dimiliki peneliti dan hasil pemahamannya  
disajikan sebagai hasil analisis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pertarungan Simbolik dalam Wacana Politik di Media Cetak

Sebagai suatu bentuk praktik sosial, tuturan  
yang digunakan dalam wacana politik merepre-

sentasikan bentuk pertarungan antara kelompok *orthodoxa* dan kelompok sub-ordinat. Kelompok *orthodoxa* berusaha untuk melegitimasi *doxa* sedangkan kelompok subordinat berusaha untuk mendelegitimasi kekuasaan kelompok *orthodoxa* agar tidak didukung masyarakat. Agar tidak dilihat sebagai bentuk kekerasan, para penutur berusaha menyembunyikan kekerasan dan motivasi yang sebenarnya, yaitu dominasi. Melalui strategi tersebut, kelompok subordinat berusaha agar masyarakat yang akan dikuasai bisa menerima ideologi penguasa sebagai “yang memang seharusnya demikian”.

Praktik pertarungan kekuasaan dalam media cetak dilakukan dengan praktik pemertahanan *doxa* oleh kelompok *orthodoxa* dan praktik penyerangan *doxa* oleh kelompok *heterodoxa*. Praktik pertarungan kekuasaan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

### 3.1.1 Praktik Pemertahanan *Doxa* oleh Kelompok *Orthodoxa*

Dalam pemerintahan sekarang ini, partai yang menjadi kelompok *doxa* adalah partai demokrat. Kemenangan dalam pemilu 2004 mendudukan partai demokrat yang diwakili oleh SBY sebagai penguasa sebagaimana dapat dilihat pada data berikut.

Setelah dalam Pemilu 2004 berhasil memperoleh suara yang signifikan 7,45 persen, nama Partai Demokrat kian melejit. Bukan hanya mengalahkan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera yang sudah eksis sebelumnya, namun partai ini juga berhasil mengantarkan sosok Yudhoyono menjadi presiden RI. (Kompas, 20 Mei 2005).

..... Untuk cakupan nasional, parpol besar yang paling terpengaruh atas kehadiran PD adalah PAN. Nilai bobot pengaruhnya 0,3 yang menunjukkan bahwa setiap PD meraih 1 persen suara di suatu daerah, perolehan suara PAN menurun 0,3 persen. (Kompas, 26 Mei 2005)

..... Tak ayal, partai-partai berbasis massa tradisional yang tinggal di perkotaan seperti PDI-P dan PKB-lah yang terpengaruh. Kehadiran PD telah membuat suara kedua partai tersebut merosot di perkotaan. (Kompas, 26 Mei 2005).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada pemilu 2004, Partai Demokrat mendapatkan kepercayaan publik. Dampaknya, partai-partai yang telah eksis sebelumnya seperti PDIP, PKB, PKS, dan PAN banyak mengalami penurunan dukungan. Masyarakat yang mengharapkan perubahan telah menempatkan Partai Demokrat sebagai *doxa*. Partai Demokrat semakin banyak didukung oleh kelompok *orthodoxa*.

Sebagai *doxa*, Partai Demokrat mempunyai kepercayaan bahwa dirinya didukung oleh masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada data berikut.

“Saya belum pernah mendengar, apalagi tahu soal itu. Saya kira itu spekulatif,” ujar Andi Mallarangeng, yang juga duduk sebagai Ketua Departemen Sumber Daya Manusia DPP Partai Demokrat. [http://pemerintahan-indonesia.infogoue.com/pernyataan\\_f\\_pg\\_dinilai\\_spekulatif/email](http://pemerintahan-indonesia.infogoue.com/pernyataan_f_pg_dinilai_spekulatif/email).

Sebagai *doxa*, Partai Demokrat yang diwakili oleh Andi Malarangeng, sekaligus Juru Bicara Kepresidenan melakukan tindak mengontrol lain, dalam hal ini Partai Golkar, agar tetap mendukungnya. Dengan menggunakan ujaran “*saya belum pernah mendengar*”, Partai Demokrat memaksakan partai lain untuk tetap mendukungnya. Karena belum pernah menyatakan secara resmi, Partai Golkar belum bisa dikatakan tidak mendukung Partai Demokrat. Dengan menggunakan ujaran “*saya kira itu spekulatif*”, Partai Demokrat yang mempunyai akses terhadap kekuasaan meyakinkan publik bahwa berita yang tersebar di media merupakan berita tidak benar. Melalui

ujarannya, Partai Demokrat melegitimasi kekuasaannya dengan mengkonstruksi citra bahwa dirinya masih didukung oleh partai lain. Kekuasaan Partai Demokrat “memaksa” publik agar menerima otoritasnya.

Untuk mempertahankan *doxa*, Partai Demokrat menunjukkan rasa percaya dirinya. Strategi tersebut digunakan Partai Demokrat untuk meyakinkan publik bahwa dirinya layak dipercaya sebagaimana dapat dilihat pada data berikut.

“Kami tidak khawatir. Ketika kebijakan pemerintah populer pasti surveinya bagus, begitupun ketika tidak populer survei turun. Jadi, ini biasa tak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya, Jakarta, Rabu (2/7/2008). <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/02/1/123879/popularitas-sby-turun-partai-demokrat-tak-khawatir>

Melalui ujarannya, Partai Demokrat menghadirkan fakta bahwa menurunnya popularitas penguasa merupakan hal yang wajar. Sebagai *doxa*, naik turunnya popularitas tidak perlu dibesar-besarkan. Dengan menggunakan ujaran “*kami tidak khawatir*”, Partai Demokrat melakukan proses penanaman ideologi meyakinkan publik bahwa mereka masih bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Partai Demokrat meyakinkan publik bahwa mereka akan mampu menaikkan popularitasnya dengan membuat kebijakan yang populer.

### 3.1.2 Praktik Penyerangan *Doxa* oleh Kelompok *Heterodoxa*

Kehadiran Partai Demokrat di kancah perpolitikan ternyata tidak membuat partai politik yang sudah lama eksis tinggal diam. Mereka membuat wacana untuk menghancurkan tatanan *doxa* dan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka berusaha mempengaruhi dunia dan menciptakan dunia baru sebagai upaya untuk menja-

tuhkan Partai Demokrat. Berbagai strategi mereka lakukan adalah sebagai berikut.

#### 1) *Menunjukkan Kekurangan Kelompok Orthodoxa*

Cara kelompok *heterodoxa* untuk menggoyahkan kekuasaan Partai Demokrat yang semakin mantap adalah sebagai berikut.

“Kami sampai harus rapat berkali-kali untuk menentukan apakah nama yang dicantumkan itu, harus nama presiden atau cukup dengan pemerintah. Akhirnya saya putuskan nama presiden saja. Saya tidak bermaksud memfitnah. Tetapi coba pahami pergolakan bathin saya bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia,” kata Wiranto kepada sejumlah media, mengenai iklan dirinya yang pekan lalu menuding SBY ingkar janji.

Di Surabaya, Sultan Hamengku Buwono X yang baru saja mencalonkan dirinya sebagai presiden untuk pemilu 2009 menilai RUU Pornografi sebagai salah satu tanda ketakutan terhadap globalisasi. Padahal, globalisasi seharusnya dihadapi dengan cara lain dan bangsa ini memiliki modal untuk itu (Kompas, 30 Oktober 2008).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa strategi kelompok *heterodoxa* melakukan serangan terhadap kelompok *orthodoxa* melalui politik pencitraan. Pencitraan kesan negatif penguasa digunakan kelompok *heterodoxa* untuk merebut simpati publik. Dengan pernyataan *Saya tidak bermaksud memfitnah* penutur berusaha memutuskan relasi kekuasaan antara pemimpin dari Partai Demokrat dengan pendukungnya. Dengan cara tersebut diharapkan citra Partai Demokrat menjadi turun. Dengan pernyataan *Tetapi coba pahami pergolakan bathin saya bahwa kenaikan harga bahan bakar*



*minyak (BBM) ini hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia* diharapkan akan terbentuk dalam kognisi masyarakat bahwa Partai Demokrat adalah yang tidak memperharikan perasaan masyarakat.

Dengan menggunakan ujaran *RUU Pornografi sebagai salah satu tanda ketakutan terhadap globalisasi* penutur mendeligitimasi kekuasaan kelompok *orthodoxa* dengan merendahkan kompetensi mereka. Dengan mencitrakan ketakutan penguasa, kelompok *heterodoxa* mengkonstruksi persepsi publik bahwa dirinya lebih pemberani daripada pemerintah yang sedang berkuasa. Strategi tersebut dilakukan penutur agar pendukung kelompok *orthodoxa* tidak percaya terhadap penguasa dan mendukung dirinya yang mencalonkan untuk menjadi penguasa. Melalui tuturannya, penutur tidak sekedar menyampaikan realitas akan tetapi merepresentasikan intensi dirinya yang berambisi memenangkan pertarungan kekuasaan di Pemilu 2009.

## 2) Memancing Permusuhan dalam Tubuh Kelompok *Orthodoxa*

Kelompok *heterodoxa* berusaha menggoyahkan keamanan dalam tubuh Partai Demokrat yang semakin mantap dengan cara memancing konflik internal. Hal itu dapat dilihat pada data berikut.

Tampaknya, jarang Ketua Umum Partai Demokrat tampil di depan publik menjadikan sosoknya tak banyak dikenal. Bahkan, nama Ketua Umum partai ini seolah-olah tenggelam dalam bayang-bayang kebesaran nama Yudhoyono (Kompas, 20 Mei 2005).

Kemenangan Hadi Utomo sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2005-2010 sungguh di luar dugaan. Meski muncul sebagai salah satu kandidat unggulan, kedudukan Hadi Utomo sebagai ipar presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal lebih dianggap sebagai kele-

mahan, ketimbang kekuatan (Kompas, 26 Mei 2005).

Dengan tuturannya, penutur berusaha memancing emosi anggota Partai Demokrat. Penonjolan nama Yudhoyono dan keluarganya (Hadi Utomo) merupakan strategi memancing emosi yang bagus. Dengan cara seperti itu, diharapkan anggota Partai Demokrat lebih berhati-hati terhadap kemungkinan Yudhoyono melanggengkan posisinya dengan melalui perlindungan dari keluarganya. Dengan kata lain, anggota Partai Demokrat harus lebih berhati-hati kalau ke depannya Partai Demokrat akan menjadi partai keluarga Yudhoyono.

Selain itu, dengan mengecilkan peran Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya diharapkan agar pendukung Hadi Utomo semakin merasa kelompoknya pantas berkuasa. Apalagi dengan didukung oleh Yudhoyono yang saudara ipar Hadi Utomo. Dengan cara di atas, diharapkan akan terpancing kecemburuan sosial antar anggota dan antarpengurus Partai Demokrat. Dengan begitu, secara perlahan-lahan diharapkan agar Partai Demokrat pecah dan turun pamornya di hadapan masyarakat.

## 3) Penyamaan Kelompok *Orthodoxa* dengan Kelompok Lain

Penutur banyak menyoroti posisi Partai Demokrat terhadap pemerintah dengan jalan membandingkan keberadaannya dengan Partai Golkar. Hal itu dapat dilihat pada data berikut.

Kuat atau lemahnya partai ini sangat bergantung pada citra yang berhasil dihimpun oleh sepak terjang Yudhoyono, baik sebagai dewan pembina partai ataupun sebagai Presiden RI. Artinya, citra Yudhoyono akan lebih menentukan perkembangan partai daripada posisi ketua umum atau jajaran pengurus lainnya. Kalau ini terus terjadi, bukan tidak mungkin, sikap independen partai akan sangat sulit ditegakkan (Kompas, 20 Mei 2005).

Kemenangan Hadi Utomo memiliki implikasi ganda. Pertama, bisa memperlemah posisi Yudhoyono sebagai Presiden, sebab semua kepentingan Partai Demokrat dengan mudah masuk lingkungan Istana Kepresidenan karena kedekatan keluarga maupun jabatan struktural dalam tubuh partai. Keputusan kongres menempatkan Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina yang mempunyai hak untuk mempengaruhi kebijakan partai. Penempatan Yudhoyono dan pembentukan jabatan Dewan Pembina mengingatkan kita akan model Golkar lama di bawah pengaruh Presiden Soeharto (Kompas, 26 Mei 2005).

Data di atas merupakan praktik penyerangan terhadap kelompok *orthodoxa* melalui praktik penghadiran kembali kejayaan partai lain. Penghadiran kejayaan Partai Golkar pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan menggunakan pernyataan *kalau ini terus terjadi, bukan tidak mungkin, sikap independen partai akan sangat sulit ditegakkan* masyarakat dipancing rasa khawatirnya terhadap Partai Demokrat. Masyarakat diajak mengingat Golkar yang terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak mampu bersikap independen dan akan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, dalam pernyataan *penempatan Yudhoyono dan pembentukan jabatan Dewan Pembina mengingatkan kita akan model Golkar lama di bawah pengaruh Presiden Soeharto* penutur membuat masyarakat punya pemikiran bahwa Partai Demokrat betul-betul mirip dengan Golkar. Dengan cara tersebut diharapkan agar masyarakat curiga dan berpikir kembali terhadap keberadaan Partai Demokrat. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati kalau mau memilih Partai Demokrat yang kemungkinan posisinya tidak jauh berbeda dengan Golkar pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto.

#### 4) Menggunakan Isu-isu SARA dan Golongan

Tindakan menghalangi berkembangnya kekuasaan Partai Demokrat dan Yudhoyono dilakukan dengan menggunakan isu-isu SARA dan golongan seperti pada data berikut.

Hal lain yang akan mengemuka adalah naiknya kembali kultur politik Jawa. Kultur politik ini sudah mulai menjauh dari figur-figur politik lain, seperti Amien Rais dan Abdurrahman Wahid (Kompas, 26 Mei 2005).

Ketika pranata-pranata politik moderen sedang terbentuk, hadirnya purnawirawan militer dalam mengelola partai politik bisa memberi sumbangsih. Namun, ketika gejolak politik menguat, kehadiran mereka masih dicurigai akan membangkitkan kembali sistem pemerintahan sentralistik, bahkan militeristik. (Kompas, 26 Mei 2005).

Ia harus terus mampu memanfaatkan figur Vence dan Mengindaan sebagai magnet konstituen Partai Demokrat di kawasan Indonesia Timur (Kompas, 30 Mei 2005).

Dengan menggunakan tuturan di atas, penutur, sebagai wakil kelompok *heterodoxa*, mengkonstruksi mitra tutur agar selalu mengontrol Partai Demokrat. Melalui ujaran *naiknya kembali kultur politik Jawa, hadirnya purnawirawan militer, dan sistem pemerintahan sentralistik, bahkan militeristik* penutur melakukan penyerangan terhadap Presiden Yudhoyono dengan jalan membandingkannya dengan figur lain seperti Amien Rais dan Abdurrahman Wahid. Penutur mengkonstruksi persepsi masyarakat bahwa Amien Rais dan Abdurrahman Wahid yang pamornya sedang menurun ternyata lebih baik daripada Presiden Yudhoyono. Melalui strategi tersebut, penutur berusaha agar masyarakat kembali

bingung dan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memilih Yudhoyono. Selain itu, dengan menggunakan kalimat pasif “*kehadiran mereka masih dicurigai akan membangkitkan kembali sistem pemerintahan sentralistik, bahkan militeristik*” penutur melakukan penyembunyian pelaku sehingga dirinya tidak dicurigai sebagai diri yang melakukan penyerangan terhadap Partai Demokrat, sebagai kelompok *orthodoxa*. Melalui bentuk kalimat pasif, penutur melakukan praktik penyembunyian tujuan sebenarnya yaitu menyerang Partai Demokrat.

### 3.2 Mekanisme Kekerasan Simbolik dalam Wacana Politik di Media Cetak

Sebagai kelompok yang berkuasa, Partai Demokrat berusaha untuk mendapatkan kepatuhan yang tidak dirasakan sebagai paksaan oleh kelompok yang didominasi. Kelompok *orthodoxa* berusaha menggunakan wacana untuk membuat kelompok yang didominasi tidak merasakan kalau sedang dikuasai. Sesuai dengan istilah Bourdieu, mereka melakukan kekerasan simbolis agar kelompok yang didominasi tetap percaya bahwa mendukung Partai Demokrat adalah suatu keharusan dan bukan paksaan. Berikut mekanisme kekerasan simbolik yang dilakukan oleh kelompok *orthodoxa*.

#### 1) Eufimisasi

Untuk menciptakan dunia yang diinginkan oleh kelompok *orthodoxa* salah satunya dilakukan dengan jalan eufimisasi. Dengan eufimisasi, kekerasan simbolik menjadi tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali, dan dipilih secara “tak sadar”. Mekanisme eufimisasi tersebut dapat dilihat pada data berikut.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutan Bhatoegana mengatakan tidak khawatir atas hasil survei Indo Barom-

eter yang menyebutkan popularitas Presiden SBY menurun. [http://news.okezone.com/index.php/ReadStory / 2008/07/02/1/123879/popularitas-sby-turun-partai-demokrat-tak-khawatir](http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/02/1/123879/popularitas-sby-turun-partai-demokrat-tak-khawatir)

Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah akan merealisasikan pembangkit listrik berdaya 10.000 mega watt. “Pembangkit listrik ini menggunakan batu bara, bukan BBM. Kalau program ini berhasil, kami optimistis popularitas pemerintah akan naik,” katanya.

Dari data di atas dapat dilihat strategi Partai Demokrat untuk menyembunyikan kekuasaannya dengan menghadirkan fakta bahwa kelompok mereka tetap solid. Melalui ujaran *tidak khawatir*, penutur menunjukkan kepatuhan dan kesetiannya pada pemerintah yang didukung oleh Partai Demokrat. Melalui ujaran *pemerintah akan merealisasikan pembangkit listrik berdaya 10.000 mega watt*, penutur mengkonstruksi persepsi publik bahwa mereka tetap komitmen menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan negara. Dengan mengatasmakan kewajiban, kepatuhan, dan kesetiaan, kelompok *orthodoxa* menyembunyikan kekerasannya demi mempertahankan dominasi.

#### 2) Sensorisasi

Mekanisme kekerasan simbolis juga dilakukan oleh *orthodoxa* dengan cara sensorisasi, yaitu dapat dilihat pada data berikut.

Sikap santun Yudhoyono mampu memompa semangat baru untuk menjadikan kultur politik Jawa sebagai identitas politik khas Partai Demokrat (Kompas, 27 Mei 2005).

Insya Allah, Insya Allah, *reshuffle* terbatas akan saya umumkan pada awal Mei. Jadi kurang lebih dua minggu lagi dari sekarang. Doakan agar tujuan yang

baik ini membuahkan hasil yang baik sekali lagi untuk peningkatan efektivitas dan kinerja dari pemerintah yang saya pimpin yang tugasnya amat berat, tantangannya amat berat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, ujar Presiden se usai shalat Jumat Baiturahman di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (Kompas, 20 April 2007).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Partai Demokrat, sebagai kelompok *orthodoxa*, melakukan praktik pelestarian nilai “kehormatan” dengan menunjukkan kesantunannya. Yudhoyono sebagai Presiden terpilih dijadikan ikon untuk melestarikan kesantunan Partai Demokrat. Dengan menggunakan ujaran “*menjadikan kultur politik Jawa sebagai identitas politik khas Partai Demokrat*” media cetak melestarikan kesucian Partai Demokrat. Dengan menggunakan ujaran “tujuan yang baik, tantangannya amat berat, meningkatkan kesejahteraan rakyat kita” Presiden Yudhoyono mensensorisasi publik bahwa kelompok mereka merupakan kelompok terhormat karena semua tidak yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik dan mempunyai tantangan yang amat berat. Selain itu, Presiden

juga menunjukkan bahwa semua tindak yang dilakukan hanya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Dengan cara di atas, Partai Demokrat, sebagai kelompok *orthodoxa*, melakukan praktik pelestarian moral kehormatannya yaitu sebagai kelompok yang santun, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Pertarungan simbolik dalam wacana politik di media cetak berupa praktik pelestarian *doxa* oleh kelompok *orthodoxa* dan penyerangan *doxa* oleh kelompok *heterodoxa*. Strategi penyerangan *doxa* dilakukan dengan (a) menunjukkan kekurangan kelompok *orthodoxa*, (b) memancing permusuhan dalam tubuh kelompok *orthodoxa*, (c) penyamaan kelompok *orthodoxa* dengan kelompok lain, dan (d) menggunakan isu-isu SARA dan golongan.
- (2) Mekanisme kekerasan simbolik dilakukan oleh *orthodoxa* dengan eufimisasi dan sensorisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, Oxford.
- Bourdieu, Pierre. 1994. *Language and Symbolic Power*. Diedit oleh John B. Thompson dan diterjemahkan oleh Gino Raymond dan Matthew Adamson. USA: Polity Press.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge*. Diterjemahkan oleh Yudi Santosa. Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Kaelan. 2004. *Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Pemikiran tentang Dasar-dasar Verifikasi Ilmiah, Logika Bahasa, Tata Permainan Bahasa, Teologi Gramatikal, Paradigma Pragmatik*. Yogyakarta: Paradigma.

- Remlinger, K. 1999. "Widening the Lens of Language and Gender Research: Integrating Critical Discourse Analysis and Cultural Practice Theory". *Linguistik Online*, 2 No 1, ([http://www.linguistik-online.de/heft1\\_99/remlinger.hatm](http://www.linguistik-online.de/heft1_99/remlinger.hatm) diakses 17 Februari 2005)
- Rusdiarti, S.R. 2003. "Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan". *Basis*. No. 11-12, Tahun ke-52. November-Desember 2003.
- Titscer dkk. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. Diterjemahkan oleh Bryan Jenner. London: Sage Publication Ltd.
- Saussure, F. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Dilaihbahasakan oleh Rahayu S. Hidayat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- van Dijk, T.A. 1998. *Critical Discourse Analysis*. Online. (<http://www.let.uva.nl/~teun/cda.html>).